

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

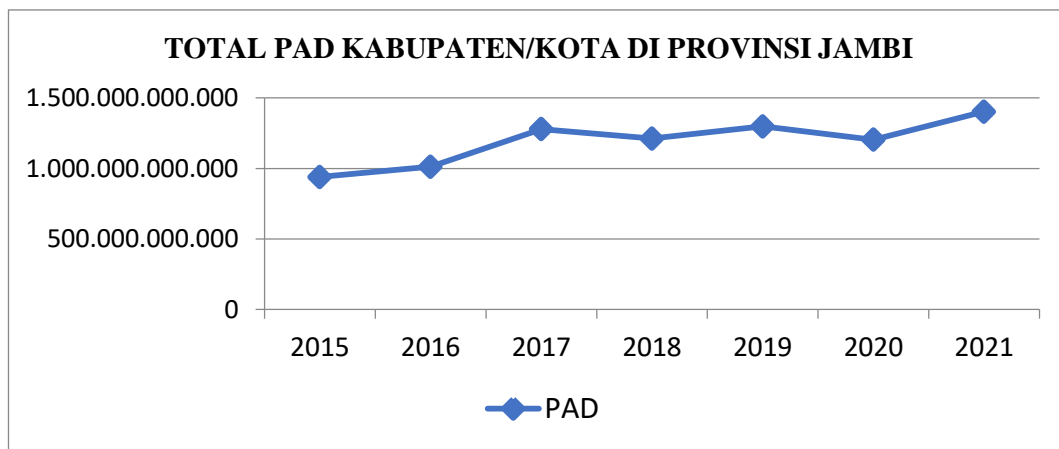
#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam urusan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan tanggung jawab, kepercayaan serta wewenang guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat atas pengelolaan daerahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, saat otonomi daerah dilaksanakan memungkinkan pemerintah daerah lebih memperhatikan masyarakat yang ada di daerahnya, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik. Ditinjau dari keberadaan otonomi daerah, ciri utama daerah yang dapat dikatakan otonom adalah kemampuan keuangan daerahnya. Faktor utama untuk melaksanakan otonomi daerah ialah keuangan daerah, meskipun diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pentingnya bahwa kebutuhan dana daerah muncul karena sumber keuangan daerah sebagai bagian integral dari pemerintah daerah.

Pada bidang keuangan pemerintah daerah memiliki hak sebagai penerimaan keuangan daerah. Pemerintah provinsi memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk secara langsung dan bebas mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang dapat digunakan sebagai pendapatan daerah tentu dilihat dari adanya potensi, dan modal pendukung berhasil dikelola dan dimanfaatkan, mencerminkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh.

Dukungan keuangan diperlukan dalam segala kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan mengandalkan sumber pendanaan yang bersumber dari PAD. PAD adalah penerimaan daerah atas melaksanakan fungsi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Anggoro, 2017). Penerimaan daerah berperan sangat penting sebagai sektor yang menunjukkan seberapa besar daerah dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah.

Provinsi Jambi sebagaimana provinsi lain yang ada di Indonesia yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam hal itu dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik dan pembangunan daerahnya diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya yakni diperoleh dari pendapatan asli daerah, dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut akan mendorong kemandirian suatu daerah akan terlaksananya kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut.



Sumber : DJPK Kementerian Keuangan RI, 2022.

**Gambar 1.1 Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

Berdasarkan data dari DJPK Kementerian Keuangan RI, secara keseluruhan ada 11 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jambi. Masing-masing daerah tersebut mempunyai potensi yang berbeda sehingga memungkinkan adanya perbedaan tingkat PAD antara masing-masing daerahnya. Selama kurun waktu tujuh tahun sejak 2015 sampai 2021, realisasi PAD di Provinsi Jambi cenderung terus meningkat. Walaupun terdapat tahun yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan realisasi PAD setiap tahunnya yang terus terjadi peningkatan dengan menunjukkan peningkatan terhadap pengelolaan sumber daya di daerah.

Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Dilihat dari rata-rata terjadi peningkatan selama 2018-2021.

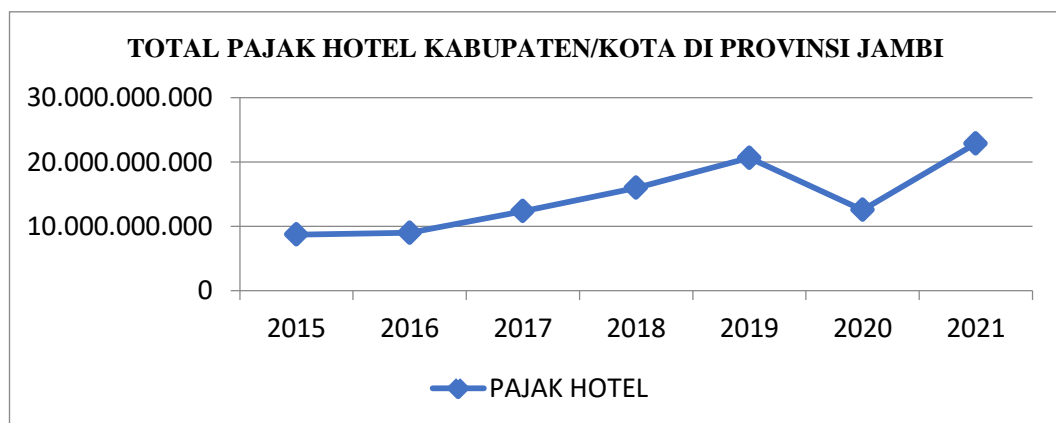
Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Kota Jambi ialah daerah dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah terbesar setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2018 total pendapatan asli daerah kabupaten/kota tersebut mengalami penurunan, capaian realisasi pendapatan asli daerah Kota Jambi yaitu Rp. 338.891.882.593. Tetapi tahun selanjutnya yaitu 2019 total pendapatan asli daerah kabupaten/kota terjadi peningkatan menjadi 1,29 triliun rupiah. PAD Kota Jambi juga meningkat 16,09 persen ditahun 2019 namun pada tahun 2020 realisasi PAD Kota Jambi terjadi penurunan -9,60 persen menjadi Rp. 355.674.818.035, hal ini akibat dari pandemi covid-19 yang membuat perekonomian daerah menurun dan penerimaan dari sumber-sumber PAD ikut menurun serta berimbas pada total pendapatan asli daerah.

Kemudian di tahun 2021 total PAD tersebut meningkat dengan signifikan tersebut mencapai 1,40 triliun rupiah, kenaikan realisasi pendapatan asli daerah merupakan dampak dari kegiatan perekonomian Provinsi Jambi yang berangsur pulih pasca merebaknya wabah covid-19. PAD Kota Jambi sebagai daerah dengan capaian realisasi PAD tertinggi ikut meningkat drastis sebesar 17,96 persen menjadi Rp 419.564.834.233 dapat dinyatakan bahwa Kota Jambi mempunyai kemandirian daerah yang paling baik dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Tingginya tingkat kemandirian Kota Jambi disebabkan oleh tingginya sumber PAD terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu diikuti daerah Kabupaten Bungo sebesar Rp.145.136.765.247 atau meningkat 15,07 persen. Sementara realisasi penerimaan PAD kabupaten/kota yang terendah ialah Kota Sungai Penuh tidak mencapai 50 juta yaitu sebesar Rp. 46.237.757.382 atau 59,16 persen ini terjadi peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2020 yaitu Rp 29.050.525.938 atau terjadi penurunan -16,76 persen dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur urutan kedua terendah sebesar Rp 53.899.818.330.

Pendapatan asli daerah setiap kabupaten/kota berbeda-beda dikarenakan perbedaan dalam pencapaian realisasi penerimaan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dalam hal peningkatan PAD ini dapat dicapai dengan senantiasa menggali sumber-sumber baru, penerimaan baru, dengan tetap meningkatkan

efisiensi sumber daya, efektivitas kegiatan yang ada namun dengan fasilitas yang seadanya. Sumber pendapatan daerah sangat mempengaruhi untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Salah satunya yakni pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah sebagai bagian pendapatan asli daerah serta merupakan penyumbang sumber pendanaan terbesar jika dibandingkan dengan penyumbang sumber pendapatan lainnya (Handayani dan Nuraina, 2012).

Dalam jenis pajak daerah kabupaten/kota, pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensinya terus meningkat. Hal ini didukung dengan pertumbuhan yang substansial dari industri perhotelan dan perkembangan sektor jasa dan pariwisata yang menjadi komponen kebijakan untuk mendukung pengembangan bisnis, hiburan dan wisata. Pajak hotel ialah pajak yang dibayarkan untuk penyediaan layanan hotel. Pajak hotel berperan penting dalam PAD dan pajak hotel memiliki potensi besar bagi pertumbuhan PAD dan mendukung semua kegiatan dari pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Didukung oleh hotel-hotel yang sudah selesai dibangun saat ini, akan menambah pendapatan pemerintah daerah.



Sumber : DJPK Kementerian Keuangan RI, 2022.

**Gambar 1.2 Total Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

Mengacu pada data yang dirilis DJPK Kemenkeu RI, capaian penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan. Dimana dari keseluruhan daerah di Provinsi Jambi, Kota Jambi berkontribusi pada penerimaan

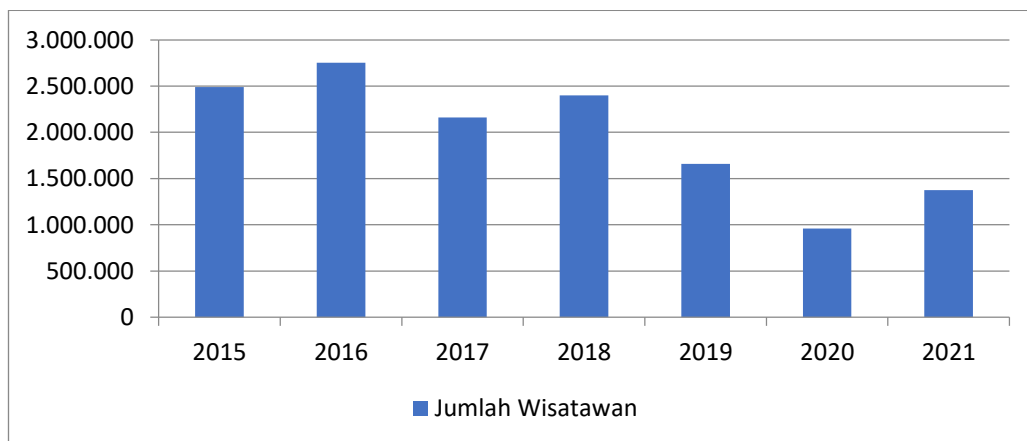
pajak hotel tertinggi yang setiap tahunnya meningkat dengan stabil. Pada tahun 2018 capaian total penerimaan pajak hotel tersebut meningkat 3,6 persen menjadi 15,9 milyar rupiah dengan capaian penerimaan pajak hotel Kota Jambi adalah Rp. 12.802.676.954 meningkat 27,17 persen dari tahun 2017. Total penerimaan pajak hotel kabupaten/kota meningkat lagi sebesar 4,79 persen tahun 2019 yakni 20,64 milyar rupiah, pada daerah Kota Jambi penerimaan pajak hotelnya juga meningkat kembali sebesar 37,64 persen menjadi Rp. 17.621.003.070, namun terlihat pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel kabupaten dan kota di Provinsi Jambi turun signifikan dengan tingkat perkembangan -7,27 persen. Ini dikarenakan pandemic covid-19 sehingga masyarakat memilih untuk dirumah saja dibandingkan berwisata atau berpergian dengan demikian pengunjung yang menginap dihotel pun menurun, usaha perhotelan mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar. Penerimaan pajak hotel Kota Jambi terjadi penurunan yang signifikan sebesar -37,82 persen menjadi Rp. 10.957.099.122.

Kemudian tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang cukup drastis yakni total penerimaan pajak hotel kabupaten/kota mencapai 22 milyar rupiah. Di tahun 2021 penerimaan pajak hotel tertinggi juga diraih oleh Kota Jambi dengan peningkatan 84,54 persen atau menjadi sebesar Rp. 20.220.000.000 dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun yang sama peningkatan penerimaan pajak hotel diikuti daerah Kabupaten Bungo sebesar Rp. 1.292.200.000 atau naik 25,48 persen. Sementara terlihat penerimaan pajak yang terkecil yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 4 tahun terakhir (2018-2021), penerimaan pajak hotelnya mengalami fluktuasi ditahun 2018 menurun sebesar -14,75 persen dengan jumlah Rp. 5.200.000, ditahun 2019 meningkat menjadi Rp.7.880.000 atau naik sebesar 51,54 persen, lalu kembali menurun di tahun 2020 sebesar -36,55 persen yang menjadi Rp. 5.000.000. di tahun selanjutnya 2021 meningkat menjadi Rp 6.000.000 atau naik 20,00 persen.

Meskipun terdapat fluktuasi dalam pencapaian pertumbuhan pendapatan asli daerah, namun potensi pajak hotel terus dimaksimalkan dan perlu diperhatikan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pungutan pajak hotel. Dalam

rangka peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut perlu mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak hotel setiap daerahnya serta juga akan berdampak pada peningkatan PAD.

Provinsi Jambi memiliki potensi wisata yang sangat beragam dan modal tersebut merupakan aset penting bagi perkembangan industri perhotelan. Keberadaan potensi ini cukup besar untuk menjadi andalan kedatangan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, dan kedatangan wisatawan dapat dilihat dari beberapa indikator bahwa pertumbuhan bisnis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar daerah tujuan wisatawan.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2022.

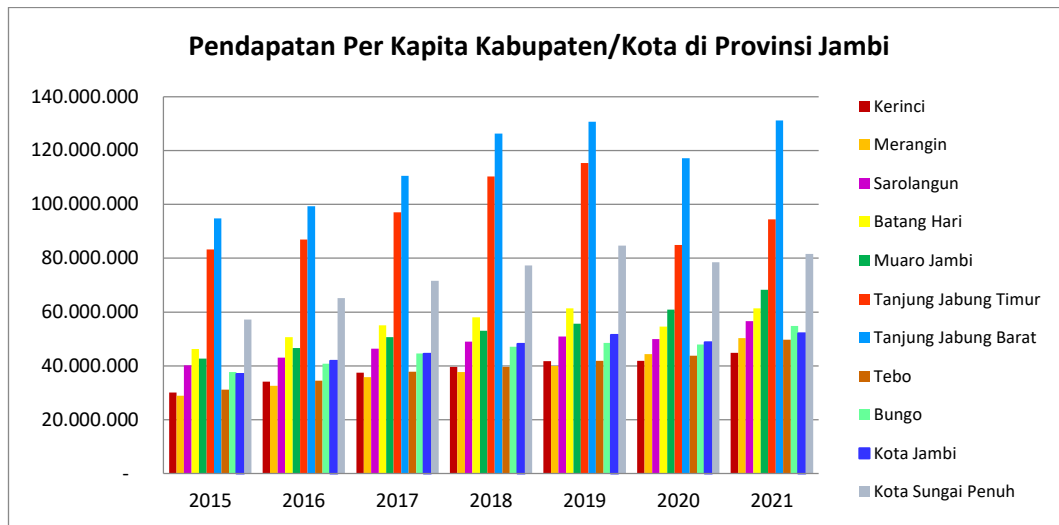
### **Gambar 1.3 Total Jumlah Wisatawan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

Jumlah wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara Kabupaten/Kota Provinsi Jambi terlihat berfluktuatif dengan pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahunnya. Perkembangan kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara dilihat dalam waktu dua tahun terakhir yakni 2019 dan 2020 terjadi penurunan diakibatkan dampak pandemi covid-19 hal tersebut dialami bukan hanya menurunnya jumlah kunjungan ke kabupaten/kota Provinsi Jambi melainkan terhadap jumlah wisatawan lokal di Indonesia dan mancanegara akibat pemberlakuan akses masuk baik dari dalam maupun luar negeri. Penurunan tersebut bisa dilihat dari jumlah wisatawan lokal dan mancanegara dari tahun 2015-2018 yang terus mengalami pertumbuhan positif. Lalu tahun selanjutnya

yakni pada tahun 2021 pertumbuhan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara kembali meningkat dengan pesat.

Dilihat data jumlah wisatawan di Provinsi Jambi tahun 2016 jumlah wisatawan tertinggi dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 2.753.447 orang. Secara keseluruhan daerah di Provinsi Jambi, Kota Jambi selalu mencapai jumlah kunjungan wisatawan tertinggi dengan mencapai 1.016.403 orang di tahun 2016. Sementara di Provinsi Jambi jumlah wisatawan paling sedikit adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah 16.490 orang. Namun seiring berjalan waktu pasca pemulihan covid-19 kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara berdasarkan kabupaten/kota Provinsi Jambi tahun 2021, data yang dihimpun dari dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi jambi jumlah pengunjung tertinggi tetaplah daerah Kota Jambi yakni dengan total sebanyak 270.444 orang, kemudian Kabupaten Kerinci 252.324 orang dan Kabupaten Merangin sebanyak 246.939 orang. Sementara jumlah keseluruhan wisatawan terendah yaitu Kabupaten Batanghari sebanyak 3244 orang dan Kota Sungai Penuh sebanyak 10.693 orang.

Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan dapat meningkatkan total pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Perdagangan serta perhotelan adalah sektor menjanjikan yang menjadi penyumbang yang cukup besar terhadap pendapatan perkapita. Meningkatnya nilai pendapatan per kapita, maka akan meningkat sumber penerimaan daerah dengan potensi tersebut. Besarnya nilai pendapatan per kapita akan meningkatkan kemakmuran suatu daerah. Dengan demikian masyarakat mendapat manfaatnya pendapatan masyarakat meningkat, hal ini dalam pajak hotel masyarakat memiliki tingkat kemampuan masyarakat yang tinggi. (Putra, 2016) menyebutkan bahwa pendapatan per kapita dapat berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan termasuk faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel itu.



Sumber : BPS Kabupaten/Kota, Provinsi Jambi, 2022.

**Gambar 1.4 Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

Dapat dilihat dari gambar di atas, pendapatan per kapita setiap daerahnya dari tahun 2015 sampai tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan hal ini diikuti dengan peningkatan kemakmuran suatu daerah. Pada tahun 2016 hingga 2021 tidak ada daerah yang mempunyai pendapatan per kapita dibawah 30 juta rupiah. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2015, dimana terhadap kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita dibawah 30 juta rupiah yaitu Kabupaten Merangin sebesar 28,90 juta rupiah. Jika pada tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai pendapatan per kapita terbesar sebesar 94,78 juta rupiah yang terus tumbuh dan mencapai 131,125 juta rupiah pada tahun 2021 diikuti daerah lain yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 94,40 juta rupiah dan Kota Sungai Penuh sebesar 81,62 juta rupiah. Capaian pendapatan per kapita terendah pada tahun 2021 ialah Kabupaten Kerinci yakni sebesar 44,82 juta rupiah. Hal ini karena masih rendahnya dan terbatas dalam pengelolaan sumberdaya alam sehingga kecilnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan per kapita daerah tersebut juga rendah. Besarnya pendapatan per kapita yang menunjukkan tingkat kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Banyaknya kamar hotel juga dapat mempengaruhi realisasi pajak hotel. Hotel sebagai sarana penunjang kenyamanan yang menyediakan layanan



penginapan kepada wisatawan akan mampu menjadi salah satu kekuatan kegiatan industri perhotelan yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hotel. Dengan bertambahnya jumlah kamar hotel serta banyaknya ketersediaan kamar hotel akan mempengaruhi penerimaan hotel. Jumlah kamar yang tersedia di hotel akan mempengaruhi keramahan hotel serta dalam penerimaan pajak daerah meningkat secara langsung seiring dengan kenaikan pajak hotel (Alisman 2015).

**Tabel 1.1 Total Jumlah Hotel, Jumlah Kamar Hotel, dan Rata-rata Tingkat Hunian Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Hotel (unit)</b>	<b>Jumlah Kamar Hotel (unit)</b>	<b>Tingkat Hunian Hotel (%)</b>
2015	184	3244	34,70
2016	199	3244	37,32
2017	207	3671	34,28
2018	232	4131	41,75
2019	236	4143	47,82
2020	232	4306	46,81
2021	234	3964	49,83

Sumber : BPS Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pembangunan hotel dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup berarti dan menunjukkan trend positif. Jumlah hotel di Provinsi Jambi terbanyak yakni pada tahun 2019 dengan jumlah 236 unit hotel, dengan daerah terbanyak hotelnya yaitu Kota Jambi dengan jumlah 99 unit hotel diikuti Kabupaten Bungo sebanyak 33 unit hotel, dan Kabupaten Merangin sebanyak 23 unit hotel. Banyaknya jumlah hotel pada daerah tersebut dipicu oleh tingginya minat para pengunjung antar daerah maupun mancanegara yang melakukan kegiatan wisata, pekerjaan, dan urusan pribadi sehingga diharuskan untuk menginap dan hotel pun juga berfungsi untuk banyak kegiatan tidak hanya untuk tidur menginap. Sementara daerah dengan jumlah hotel paling sedikit yaitu Kabupaten Muaro Jambi yang hanya terdapat 1 unit hotel pada daerah tersebut, lalu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni sebanyak 6 unit hotel. Sedikitnya jumlah hotel yang ada pada daerah tersebut dikarenakan

pengunjung yang datang ke daerah tersebut melakukan kegiatan kunjungan wisata, urusan pekerjaan dapat dilakukan pulang pergi dan tidak perlu untuk menginap di hotel sehingga potensi pembangunan akan hotel sangat rendah.

Dengan meningkatnya jumlah hotel, maka laju pertumbuhan kamar hotel pada setiap daerah di Provinsi Jambi juga menunjukkan trend positif serta meningkat setiap tahunnya. Ini juga sejalan dengan banyaknya jumlah hotel yang terdapat di Provinsi Jambi. Berdasarkan kabupaten/kota Provinsi Jambi selama jangka waktu 7 tahun yakni 2015-2021. Seiring bertambahnya jumlah hotel, jumlah kamar hotel pun ikut bertambah. Terlihat pada tahun 2019 sebanyak 4143 unit kamar hotel dan diduduki oleh Kota Jambi dengan jumlah 2097 unit kamar hotel. Pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah hotel menjadi 232 unit hotel, namun jumlah kamar hotel tidak ikut berkurang melainkan bertambah sebanyak 163 unit kamar hotel dengan total 4306 unit kamar hotel namun di beberapa daerah mengalami penurunan jumlah kamar hotel yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.

Pasca wabah covid-19 terlihat jumlah hotel tahun 2021 bertambah 2 unit hotel menjadi sebanyak 234 unit hotel akan tetapi jumlah kamar hotel berkurang menjadi 3.987 unit kamar hotel tetapi seiring berjalannya waktu pertumbuhan pembangunan kamar hotel kembali meningkat di Kabupaten Sarolangun sebanyak 261 unit dengan jumlah sebelumnya 212 unit. Jumlah kamar hotel terbanyak di Kota Jambi sebanyak 1556 unit. Terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan yang signifikan pada jumlah kamar hotel daritahun sebelumnya. Hal tersebut dialami dengan sebab adanya virus covid-19 pada tahun sebelumnya yang berimbas pada tahun 2021 dan pemerintah pun memberlakukan kebijakan pembatasan akses aktivitas diluar rumah sehingga pengunjung yang akan menginap berkurang membuat pemasukan hotel menurun dan kamar yang tersedia di hotel banyak di tutup dan pihak hotel akhirnya terpaksa mengurangi ketersediaan kamar.

Rudi (2001) menyatakan bahwa pariwisata, terutama aktivitas yang berhubungan dengan akomodasi ialah hotel, apabila wisatawan tinggal lebih lama

maka pendapatan hotel akan meningkat, dan sebaliknya. Hotel menyediakan kamar hotel bagi wisatawan yang ingin menginap, memberikan pelayanan terbaik. Dengan pelayanan terbaik yang diberikan tersebut agar para tamu puas dan nyaman, maka akan mempengaruhi tingkat hunian hotel.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, tingkat hunian hotel tahun 2015-2021, persentasenya cenderung terjadi peningkatan. Dilihat dari rata-rata tingkat hunian hotel persentasenya tertinggi ialah tahun 2019 dan juga melihat rata-rata tingkat hunian per kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2015 hingga 2021 yakni tertinggi pada Kabupaten Merangin sebesar 78,16 persen. Diikuti dengan Kota Sungai Penuh dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 59,26 persen. Tingkat hunian kamar hotel terendah yakni pada Kabupaten Batanghari dengan rata-rata 13,74 persen. Hal ini dikarenakan jumlah hotel dan kamar hotel di Kabupaten Batanghari sedikit. Tingkat hunian hotel merupakan hal penting dengan meningkatnya tingkat hunian, maka akan mendapat peluang besar untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan di industri akomodasi (Nawangsih dan Bandesa, 2013).

Adanya potensi pajak yang relatif besar diharapkan dapat sebagai kekuatan Provinsi Jambi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan PAD. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut dengan mengetahui variabel jumlah wisatawan, pendapatan per kapita, jumlah kamar hotel, dan tingkat hunian hotel pada latar belakang dapat dikatakan dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel, sehingga besarnya penerimaan pajak hotel bisa mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Determinan Penerimaan Pajak Hotel Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel kabupaten/kota di Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis  
Hasil penelitian ini sebagai referensi yang memberikan wawasan bagi pemerhati pajak hotel pada kabupaten/kota.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini bagi pemerintah kabupaten/kota khususnya Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.